

DIVERSIFIKASI KONSUMSI PANGAN DI INDONESIA : ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Mewa Ariani

Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jalan A. Yani No. 70 Bogor 16161

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dan strategis, mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Hak atas pangan merupakan bagian penting dari hak azasi manusia seperti yang dituangkan dalam Universal Declaration of Human Right. Pada KTT Pangan Sedunia tahun 1996 di Roma, para pemimpin negara dan pemerintah telah mengikrarkan kemauan politik dan komitmennya untuk mencapai ketahanan pangan dan melanjutkan upaya penghapusan kelaparan di semua negara anggota separuhnya, dari 800 juta jiwa pada tahun 1996 menjadi 400 juta jiwa pada tahun 2015.

Pembangunan ketahanan pangan di Indonesia ditegaskan dalam Undang-undang Pangan nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan dan PP nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi pemenuhan kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, merata dan terjangkau (BBKP, 2003). Beberapa hasil kajian menunjukkan persediaan pangan yang cukup secara nasional terbukti tidak menjamin pewujudan ketahanan pangan pada tingkat wilayah (regional), rumah tangga atau individu. Martianto dan Ariani (2004) menunjukkan bahwa jumlah proporsi rumah tangga yang defisit energi di setiap provinsi masih tinggi. Berkaitan dengan hal ini, diversifikasi pangan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Dari segi fisiologis, manusia untuk dapat hidup aktif dan sehat memerlukan lebih 40 jenis zat gizi yang terdapat pada berbagai jenis makanan. Tidak ada satupun jenis pangan yang lengkap gizinya kecuali ASI (Martianto, 2005).

Upaya membangun diversifikasi konsumsi pangan telah dilaksanakan sejak tahun 60-an. Saat itu pemerintah mulai menganjurkan konsumsi bahan pangan pokok selain beras. Kemudian di akhir Pelita I (1974), secara eksplisit pemerintah mencanangkan kebijaksanaan diversifikasi pangan melalui Inpres No. 14 tahun 1974 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat (UPMMR), dan disempurnakan melalui Inpres No.20 tahun 1979.

Maksud dari instruksi tersebut adalah untuk lebih menganekaragamkan jenis pangan dan meningkatkan mutu gizi makanan rakyat baik secara kualitas maupun kuantitas sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Namun dalam perjalanannya, tujuan diversifikasi konsumsi pangan lebih ditekankan sebagai

usaha untuk menurunkan tingkat konsumsi beras, karena diversifikasi konsumsi pangan hanya diartikan pada penganeekaragaman pangan pokok. Selanjutnya program diversifikasi konsumsi pangan dilakukan secara parsial baik dalam konsep, target, wilayah dan sasaran, tidak dalam kerangka diversifikasi secara utuh. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana diversifikasi konsumsi pangan termasuk pangan pokok di Indonesia.

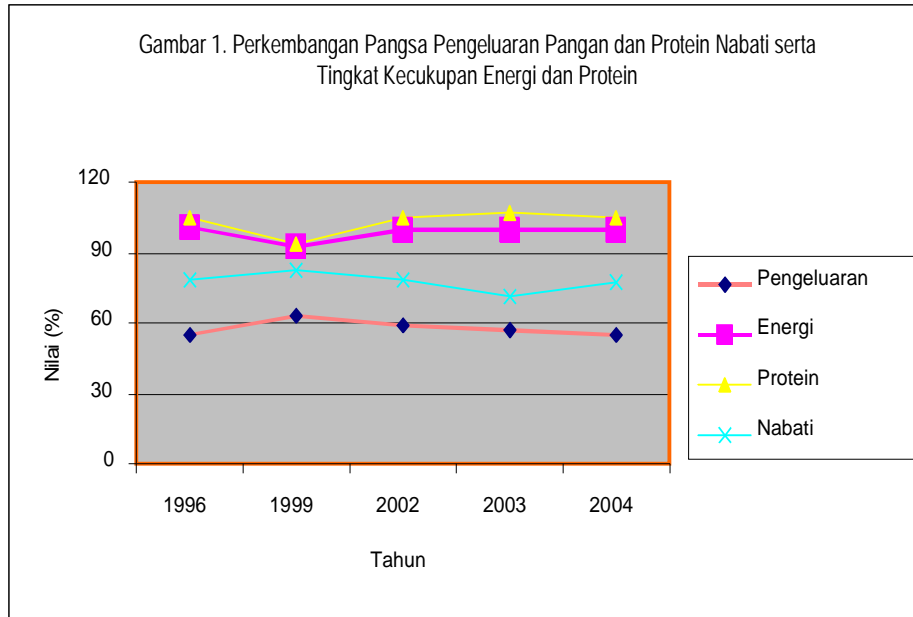
DIVERSIFIKASI KONSUMSI PANGAN : SUDAHKAN SESUAI HARAPAN?

Kebijakan atau program secara langsung dan tidak langsung yang terkait dengan diversifikasi konsumsi pangan terus digulirkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan dan dilakukan oleh banyak instansi. Sebagai contoh gerakan sadar pangan dan gizi yang dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan, program diversifikasi pangan dan gizi oleh Departemen Pertanian (1993-1998) dan lain-lain. Dari sisi kelembagaan, tahun 1989 pada kabinet Pembangunan VI dibentuk Kantor Menteri Negara Urusan Pangan yang meluncurkan slogan " Aku Cinta Makanan Indonesia (ACMI). Pada tahun 1996 telah lahir Undang-undang no. 7 tentang Pangan. Kemudian pada tahun 2002 muncul Kepres No. 68 tentang Ketahanan Pangan. Tahun 2001 pada era Kabinet Gotong Royong telah dibentuk Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang dipimpin langsung oleh Presiden (Suyono, 2002). Dalam usaha perwujudan ketahanan pangan pada umumnya dan diversifikasi konsumsi pangan pada khususnya juga dituangkan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Program ini mempunyai salah satu tujuan yaitu menjamin peningkatan produksi dan konsumsi yang lebih beragam (Krisnamurthi, 2003).

Pertanyaannya, bagaimana dampak dari berbagai kebijakan atau program tersebut terhadap perkembangan diversifikasi konsumsi pangan ? Sebelum krisis ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia cukup menggembirakan yang ditunjukkan oleh pangsa pengeluaran pangan yang semakin rendah (55,4 %). Namun krisis ekonomi yang ditandai dengan kenaikan harga pangan dan peningkatan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja telah mengakibatkan kesejahteraan masyarakat menurun secara signifikan. Upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional melalui berbagai kebijakan strategis di bidang ekonomi, pertanian dan lain-lain sedikit demi sedikit telah mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk. Hal ini ditunjukkan oleh pangsa pengeluaran pangan pada tahun 2004 lebih kecil dibandingkan pada kondisi sebelum krisis ekonomi (Gambar 1).

Dengan mengacu pada patokan yang telah ditetapkan dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VI (1998) bahwa kecukupan energi rata-rata sebesar 2200 Kalori/kapita/hari dan protein sebesar 48 gram/kapita/hari, berarti tingkat konsumsi energi penduduk Indonesia sampai tahun 2004 masih belum sesuai patokan yang

dianjurkan. Berbeda dengan protein, konsumsi protein pada tahun 2004 sudah lebih besar dari yang dianjurkan (105,1 %), namun sebagian besar protein yang dikonsumsi masyarakat masih berasal dari pangan nabati (77 %), yang kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan pangan hewani. Walaupun pangsa pengeluaran pangan menunjukkan peningkatan pada tahun 2004 dibandingkan dengan tahun 2003, namun konsumsi energi dan protein menunjukkan sebaliknya.



Konsumsi pangan termasuk konsumsi energi dan protein sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat dan kesadaran masyarakat terhadap pangan dan gizi. Seperti terlihat pada Tabel 1, bahwa tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat berbeda antarkelompok pendapatan dan terdapat kecenderungan semakin tinggi pendapatan semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Dengan mengacu pada patokan anjuran dalam WNPG VI tahun 1998, seseorang akan terpenuhi konsumsi energi dan proteinnya apabila pendapatan per kapita per bulannya diatas Rp. 200.000. Dengan memperhatikan pada Tabel 1, berarti jumlah penduduk yang memenuhi kriteria tersebut hanya 43,4 persen atau dalam arti jumlah penduduk yang mengalami kekurangan pangan atau rawan pangan masih besar dan apabila hal ini tidak ditangani secara serius akan berdampak pada kualitas sumberdaya manusia Indonesia.

Tabel 1. Konsumsi Energi dan Protein menurut Kelompok Pendapatan, 2004

Kelompok Pendapatan (Rp/kap/bl)	Penduduk (%)	Energi (Kal/kap/hr)	Protein (gram/kap/hr)
I = < 60.000	0,72	1.240,9	31,5
II =60.000-79.999	3,45	1.452,0	28,0
III =80.000-99.999	7,80	1.627,6	37,5
IV =100.000-149.999	23,17	1.794,9	43,3
V =150.000-199.999	21,47	1.983,4	49,4
VI =200.000-299.999	22,82	2.126,8	54,6
VII =300.000-499.999	14,01	2.253,1	62,2
VIII = >500.000	6,57	2.398,0	72,9

Sumber : Susenas 2004. BPS

Diversifikasi konsumsi pangan pada dasarnya memperluas pilihan masyarakat dalam kegiatan konsumsi sesuai dengan cita rasa yang diinginkan dan menghindari kebosanan untuk mendapatkan pangan dan gizi agar dapat hidup sehat dan aktif. Hal ini memang sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat, pengetahuan, ketersediaan, dukungan kebijakan dan faktor sosial budaya. Secara implisit, upaya diversifikasi konsumsi pangan dapat diidentikkan dengan upaya perbaikan gizi untuk mendapatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia yang mampu berdaya saing dengan negara-negara lain.

Dalam upaya mengoperasionalkan konsep diversifikasi konsumsi pangan, FAO RAPA pada tahun 1989 mengadakan pertemuan para ahli pangan dan gizi di Bangkok dengan merumuskan komposisi pangan yang ideal yang terdiri dari 57-68 persen dari karbohidrat, 10-13 persen dari protein, dan 20-30 persen dari lemak. Rumusan ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk energi dari 9 kelompok pangan yang dikenal dengan istilah Pola Pangan Harapan (PPH). Sejak diperkenalkan di Indonesia, konsep PPH ini mendapat perhatian dari kalangan ilmuwan di bidang pangan dan gizi untuk dapat diterapkan dengan kondisi Indonesia. Hasil kajian terakhir dan sebagai bahan referensi bagi semua pihak yang membutuhkan, proporsi energi dari masing-masing kelompok pangan seperti pada Tabel 2 atau 3.

Pola konsumsi pangan di Indonesia masih belum sesuai dengan pola pangan ideal yang tertuang dalam PPH. Konsumsi dari kelompok padi-padian (beras, jagung, terigu) masih dominan baik di kota maupun di desa. Pangsa konsumsi energi seharusnya dari kelompok pangan padi-padian hanya 50 persen, namun kenyataannya masih sebesar 60,7 persen di kota dan 63,9 persen di desa. Sebaliknya, pangsa energi dari umbi-umbian masih sekitar setengahnya dari yang dianjurkan, padahal di Indonesia tersedia berbagai jenis umbi-umbian dengan harga yang relatif murah. Pada umumnya memang pola konsumsi Indonesia masih lebih rendah dari yang dianjurkan PPH, kecuali padi-padian seperti yang telah diutarakan sebelumnya. Namun yang perlu diwaspadai adalah konsumsi pangan sumber lemak+minyak dan gula sudah berlebih. Kelebihan

dari kedua pangan ini akan membawa dampak negatif bagi kesehatan terutama penyakit degeneratif seperti tekanan darah tinggi, jantung dan diabetes.

Tabel 2. Perkembangan Konsumsi Energi Menurut Kelompok Pangan di Kota, 1999-2004 (%)

Kelompok Pangan	Harapan	Kenyataan			
		1999	2002	2003	2004
- Padi-padian	50,0	63,9	60,2	60,6	60,7
- Umbi-umbian	6,0	2,3	2,4	2,2	2,1
- Pangan hewani	12,0	6,3	8,3	8,7	9,7
- Minyak+lemak	10,0	10,5	11,2	10,8	10,8
- Buah/biji berminyak	3,0	1,7	2,0	2,1	1,9
- Kacang-kacangan	5,0	3,5	4,2	3,9	3,7
- Gula	5,0	5,3	5,4	5,2	5,3
- Sayur+buah	6,0	4,9	4,3	4,6	4,1
- Lain-lain	3,0	1,5	2,0	1,8	1,8

Sumber : Susenas 1999, 2002, 2003,2004. BPS

Tabel 3. Perkembangan Konsumsi Energi Menurut Kelompok Pangan di Desa, 1999-2004 (%)

Kelompok Pangan	Harapan	Kenyataan			
		1999	2002	2003	2004
- Padi-padian	50,0	68,3	64,5	64,6	63,9
- Umbi-umbian	6,0	4,5	4,2	4,1	5,1
- Pangan hewani	12,0	3,8	4,7	5,3	5,3
- Minyak+lemak	10,0	8,4	9,4	9,1	9,0
- Buah/biji berminyak	3,0	2,5	2,9	2,9	2,7
- Kacang-kacangan	5,0	2,5	3,3	2,9	3,3
- Gula	5,0	4,8	5,4	4,9	4,8
- Sayur+buah	6,0	3,9	4,2	4,6	4,3
- Lain-lain	3,0	1,3	1,8	1,5	1,6

Sumber : Susenas 1999, 2002, 2003,2004. BPS

Dalam konsep PPH, setiap kelompok pangan dalam bentuk energi mempunyai pembobot yang berbeda tergantung dari peranan pangan dari masing-masing kelompok terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebagai contoh, pembobot pada kelompok padi-padian, umbi-umbian dan gula hanya 0,5 karena pangan tersebut hanya sebagai sumber energi untuk pertumbuhan manusia. Sebaliknya pangan hewani dan kacang-kacangan sebagai sumber protein yang berfungsi sebagai pertumbuhan dan perkembangan manusia mempunyai pembobot 2 dan sayur+buah sebagai sumber vitamin dan mineral, serat, dan lain-lain mempunyai pembobot 5. Dengan mengkalikan proporsi energi dengan masing-masing pembobotnya, maka dalam konsep PPH akan diperoleh skor sebesar 100. Dalam arti diversifikasi konsumsi pangan sesuai konsep PPH harus mempunyai skor 100.

Seperti telah diungkapkan terdahulu, pola konsumsi pangan di Indonesia masih dominan padi-padian dan masih lebih rendah dari yang dianjurkan, sehingga skor PPH juga belum mencapai 100. Diversifikasi konsumsi pangan di perkotaan lebih baik daripada di pedesaan (Tabel 4). Secara umum jika dibandingkan pada priode krisis ekonomi, keragaan konsumsi pangan di Indonesia semakin membaik (Tabel 2, 3 dan 4, Gambar 1) Namun kondisi tersebut tidak bertahan lama karena situasi konsumsi pangan pada tahun 2004 lebih buruk daripada tahun 2003, walaupun tingkat kesejahteraannya (pangsa pengeluaran pangan) membaik. Penurunan terjadi pada tingkat konsumsi energi dan protein, pangsa protein nabati meningkat, tingkat diversifikasi konsumsi pangan menurun. Konsumsi energi dan protein pada tahun 2003 masing-masing sebesar 1991,0 Kalori dan 55,4 gram/kapita/hari menjadi 1986,0 Kalori dan 54,7 gram/kapita/hari pada tahun 2004.

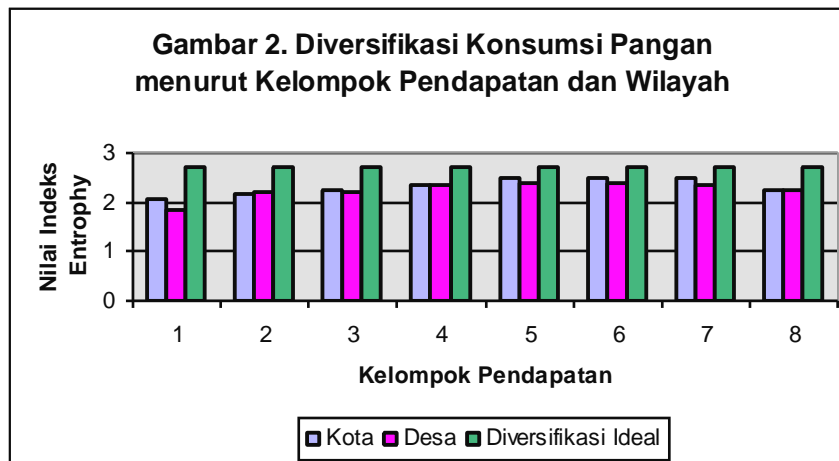
Tabel 4. Perkembangan Diversifikasi Konsumsi Pangan Menurut Pola Pangan Harapan, 1999-2004

Tahun	Kota	Desa
1999	68,5	66,3
2002	80,1	72,6
2003	81,9	77,5
2004	80,0	76,9

Keterangan : Skor PPH ideal = 100

atau kelompok pangan. Dengan menggunakan data pengeluaran dari masing-masing kelompok pangan menunjukkan pola konsumsi pangan di Indonesia juga belum terdiversifikasi secara sempurna seperti pada Gambar 2.

Selain dalam bentuk zat gizi berdasarkan analisis dengan konsep PPH, perumusan diversifikasi konsumsi pangan juga dapat dilakukan dengan menggunakan Indeks Entropy seperti telah dipakai oleh para pakar dan peneliti yang lain. Nilai indeks Entrophy mulai dari nol apabila rumah tangga hanya mengkonsumsi satu jenis pangan atau kelompok pangan sampai dengan n apabila rumah tangga membelanjakan pengeluaran pangannya merata untuk seluruh jenis pangan



DIVERSIFIKASI KONSUMSI PANGAN POKOK : KE ARAH MANA?

Pangan pokok didefinisikan sebagai pangan yang dikonsumsi secara rutin sehari-hari dalam jumlah besar sebagai sumber energi. Pangan pokok utama adalah pangan pokok yang dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk (Khumaidi, 1997). Di Indonesia, yang menjadi pangan pokok adalah beras, jagung, ubikayu, ubijalar, tales, sagu, pisang (khususnya di provinsi Papua) bahkan sekarang ditambah dengan makanan berupa mi instant, mi basah dan lain-lain yang bahan bakunya dari gandum. Pangan tersebut kecuali mi dikelompokkan dalam kelompok padi-padian dan umbi-umbian. Dengan demikian, pengeluaran untuk kedua kelompok pangan ini dapat digunakan sebagai cerminan sejauhmana situasi konsumsi pangan pokok.

Secara rata-rata pangsa pengeluaran padi-padian adalah terbesar dibandingkan dengan kelompok pangan yang lain. Namun untuk dikota pengeluaran padi-padian terkalahkan dengan pengeluaran makanan/minuman jadi. Secara kualitatif memang terlihat perubahan konsumsi pada masyarakat kota. Masyarakat di perkotaan berubah perilaku makannya dari terbiasa makan di rumah menyukai makan di luar rumah dengan membeli makanan jadi. Kecenderungan ini sebagai dampak bermunculannya industri makanan olahan seperti rumah makan/restoran yang tersedia di mana-mana yang memberikan unsur kenyamanan, keindahan dan mampu membangkitkan selera konsumen.

Bentuk dan jenis pilihan makanan olahan berkembang sangat pesat, apalagi sejak krisis ekonomi bermunculan warteg-warteg atau cafe yang menyajikan berbagai jenis masakan dengan harga yang relatif terjangkau. Belum lagi dampak dari peningkatan penyerapan tenaga kerja termasuk wanita yang dituntut untuk makan di luar rumah dan dengan keterbatasan waktunya, wanita yang bekerja cenderung membeli makanan jadi bagi anggota keluarganya. Kedua kondisi tersebut berdampak pada peningkatan konsumsi makanan/minuman jadi dan konsumsi makanan semakin beragam. Beberapa kondisi tersebut diduga berdampak pada penurunan pangsa pengeluaran padi-padian dan umbi-umbian (Tabel 5).

Tabel 5. Perkembangan pangsa pengeluaran padi-padian dan Umbi-umbian, 1999-2004 (%)

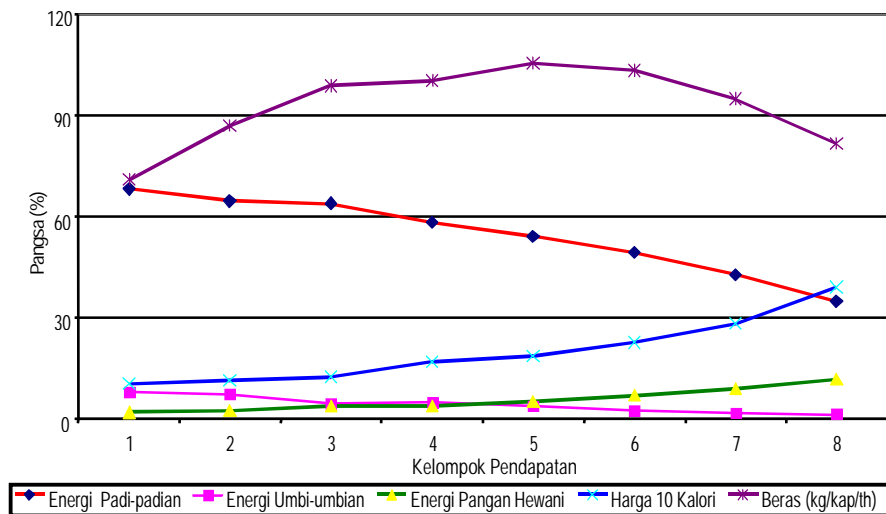
Kelompok Pangan/ Wilayah	1999	2002	2003	2004	Laju 1999-2004 (%)
Padi-padian					
Kota	21,1	16,4	13,8	13,3	(16,10)
Desa	31,5	27,0	22,8	21,6	(13,18)
Umbi-umbian					
Kota	0,94	0,88	0,83	0,85	(3,66)
Desa	1,50	1,35	1,48	2,00	(10,30)

Sumber : Susenas, 1999, 2002, 2003, 2004. BPS

Sejalan dengan peningkatan pendapatan, masyarakat akan dihadapkan pada banyak pilihan makanan yang sesuai selera tanpa kendala keuangan. Preferensi dan selera seseorang akan mengalami perubahan dari pilihan makanan yang sederhana dengan harga murah untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti hanya terfokus pada pangan sumber karbohidrat berubah ke makanan yang juga sumber protein, vitamin dan mineral untuk memenuhi kebutuhan gizi yang lebih lengkap jenis dan jumlahnya.

Selain itu, juga mulai terjadi perubahan dalam aspek psikologis seseorang, dalam bentuk ingin mencoba makanan lain yang lebih mempunyai unsur "kegengsian" yang merupakan salah satu cara untuk memenuhi perubahan gaya hidup yang lebih mapan dan modern. Sehingga muncul istilah bahwa perubahan gaya hidup (life style) akan mengubah gaya makan (eat style) . Pangsa energi dari padi-padian dan umbi-umbian akan mengalami penurunan akibat peningkatan pendapatan. Sebaliknya energi dari pangan hewani dan harga kalori yang dikonsumsi per satuan akan semakin mahal (Gambar 3)

Gambar 3. Hubungan Pendapatan dengan Konsumsi Beras, Pangsa Energi Pangan Pokok dan Hewani serta Harga Kalori



Diversifikasi konsumsi pangan pokok yang didekati dengan sumbangan energi dari masing-masing pangan pokok termasuk memasukkan konsumsi mi menunjukkan kecenderungan yang mengarah kepada satu pangan pokok tunggal yaitu beras. Tingkat konsumsi beras sekitar 100 kg/kapita/tahun walaupun cenderung menurun dari tahun ke tahun dengan laju penurunan sebesar 4,2 persen pada periode 1999-2004 (Tabel 6). Demikian pula untuk konsumsi umbi-umbian juga cenderung menurun. Peningkatan laju

konsumsi ubijalar sebetulnya lebih disebabkan peningkatan konsumsi pada tahun 2004, yaitu dari 2,7 kg menjadi 3,3 kg/kapita/tahun.

Program diversifikasi konsumsi pangan pokok yang selama ini diharapkan untuk mengkonsumsi pangan pokok nonberas lebih banyak tidak tercapai. Oleh karena itu, upaya untuk lebih menganekaragamkan konsumsi pangan dan juga pangan pokok masih harus terus ditingkatkan disertai upaya mencari strategi dan cara yang jauh lebih efektif dari apa yang dilaksanakan selama ini. Sebaliknya dengan maraknya jenis mie dengan berbagai harga, rasa dan jenis telah mampu mempengaruhi konsumen untuk mencoba dan menyenangkannya. Konsumsi mi ini terus meningkat dari tahun ke tahun, bahkan rata-rata konsumsi mi instant mencapai 28 bungkus per tahun.

Tabel 6. Perkembangan Konsumsi Pangan Pokok dan Lajunya, 1999-2004

No.	Kelompok Pangan	Komoditas	1999	2002	2004	Laju Th. 1999-2004 (%)
1.	Padi-padian	-Beras	116,5	115,5	107,0	(4,2)
		-Jagung	3,4	3,4	3,2	(3,0)
		-Terigu	6,5	8,5	7,7	7,9
2.	Umbi-umbian	-Ubikayu	12,7	11,7	12,0	(2,9)
		-Ubijalar	2,8	2,7	3,3	8,5
		-Tales	0,4	0,5	0,6	20,0
		-Sagu	0,5	0,3	0,3	(27,3)
		-Kentang	1,0	1,8	1,6	20,5
3.	Macam2 Mi	-Basah (kg)	0,2	0,2	0,2	0,0
		-Instant (bks)	18,7	26,1	28,0	19,2
		-Instant (porsi)	0,8	1,3	1,1	14,1

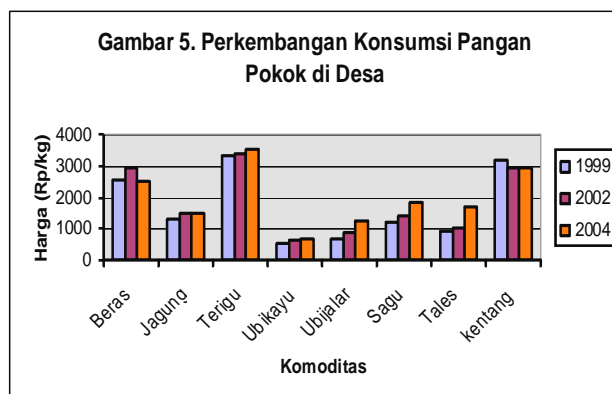
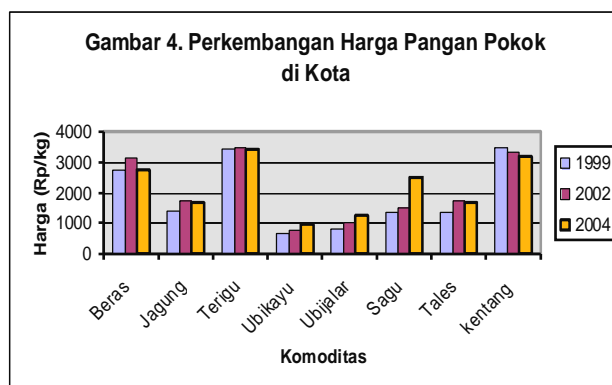
Sumber : Susenas 1999, 2002, 2004. BPS

Kalau dahulu bangsa Indonesia dikenal dengan berbagai pola pangan pokok seperti sagu di Provinsi Maluku dan Papua atau jagung di Nusa Tenggara Timur, kini hal tersebut tidak seluruhnya benar. Walaupun di beberapa kabupaten di ketiga provinsi tersebut masih dijumpai masyarakat yang mengkonsumsi jagung atau sagu, namun sebagian besar masyarakat sudah mengkonsumsi beras sebagai pangannya. Seperti terlihat dari tingkat partisipasi konsumsi beras di Provinsi NTT dan Papua yang mencapai hampir 100 persen, sedangkan untuk jagung atau sagu tidak sampai 50 persen. Kedudukan kedua komoditas tersebut telah tergeser oleh beras (Tabel 7). Walaupun harga komoditas pangan pokok tersebut tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan (Gambar 4 dan 5).

Tabel 7. Tingkat Partisipasi Konsumsi Beras, Jagung dan Sagu di Provinsi NTT (2002) dan Papua (1999) (%)

No.	Jenis Pangan	Kota	Desa	Kota + Desa
1.	Provinsi NTT			
	Jagung			
	- Jagung basah dengan kulit	26,2	37,7	31,9
	- Jagung pipilan	14,4	46,8	30,6
	- Tepung jagung	0,0	0,4	0,2
	Beras			
	- Beras	99,3	98,6	98,9
	- Beras ketan	2,2	1,0	1,6
	- Tepung beras	3,0	0,4	1,7
2.	Propinsi Papua			
	Sagu	11,8	43,9	27,9
	Beras			
	- Beras	96,5	86,4	91,4
	- Beras ketan	0,9	1,2	1,0
	- Tepung beras	0,0	0,0	0,0

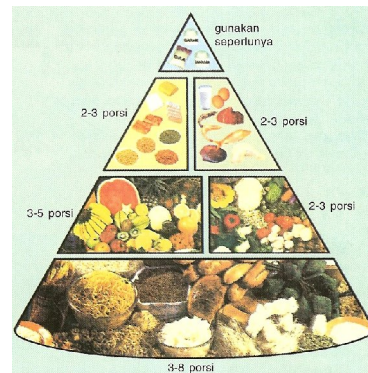
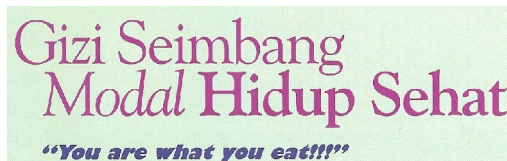
Sumber: Susenas, 2002, Untuk Papua Susenas 1999



KEBIJAKAN DIVERSIFIKASI KONSUMSI PANGAN KE DEPAN

Definisi diversifikasi konsumsi pangan yang telah ditetapkan dalam PP nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang. Prinsip dasar dari diversifikasi konsumsi pangan adalah bahwa tidak ada satupun komoditas atau jenis pangan yang memenuhi unsur gizi secara keseluruhan yang diperlukan oleh tubuh. Belum lagi dengan adanya peranan pangan sebagai pangan fungsional seperti adanya serat, zat antioksidan dan lain-lain sehingga memilih jenis makanan tidak semata-mata pertimbangan unsur gizi seperti kandungan energi, protein, vitamin dan mineral tetapi juga mempertimbangkan fungsional lainnya seperti telah disebutkan diatas.

Sebagai bahan evaluasi program atau perencanaan di bidang pangan dan gizi terutama terkait dengan diversifikasi konsumsi pangan suatu wilayah tertentu atau masyarakat tertentu dapat menggunakan konsep PPH. Namun untuk menggiring seseorang agar mengkonsumsi pangan yang beranekaragam dengan prinsip : makanan yang bergizi, berimbang, beranekaragam, aman, halal dituangkan dalam Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS) sejak tahun 1994. Memang diakui slogan ini belum populer di masyarakat masih kalah dengan konsep 4 sehat 5 sempurna yang ada sejak tahun 1950-an. Dalam PUGS terdapat 12 pesan yang dikembangkan dan ditentukan melalui serangkaian kajian ilmiah berdasarkan masalah gizi utama di Indonesia, perkembangan penyakit degeneratif, teknologi komunikasi dan aspek sosial budaya masyarakat (Jaringan Informasi Pangan dan Gizi, 2002). Adapun model PUGS yang berisi pesan tersebut digambarkan dalam logo tumpeng (kerucut) dan anjuran porsi makan. Dalam logo tersebut makanan dikelompokkan berdasarkan fungsi utama zat gizi yang dikenal Tri Guna Makanan (sumber tenaga, sumber zat pengatur dan sumber zat pembangun).



Program diversifikasi konsumsi pangan telah ada sejak dahulu, namun dalam perjalanannya menghadapi berbagai kendala baik dalam konsep maupun pelaksanaannya. Beberapa kelemahan diversifikasi konsumsi pangan masa lalu adalah (1) Distorsi konsep ke aplikasi, diversifikasi konsumsi pangan bias pada aspek produksi/penyediaan; (2) Penyempitan arti, diversifikasi konsumsi pangan bias pada pangan pokok dan energi politik untuk komoditas beras sangat dominan; (3) Koordinasi kurang optimum, tidak ada lembaga yang menangani secara khusus dan berkelanjutan; (4) Kebijakan antara satu departemen dengan departemen lainnya kontra produktif terhadap perwujudan diversifikasi konsumsi pangan; (5) Kebijakan yang sentralistik dan penyeragaman, mengabaikan aspek budaya dan potensi pangan lokal; (6) Riset diversifikasi konsumsi pangan masih lemah, bias pada beras, terpusat di Jawa-Bali, Fokus pada on-farm, dana hanya dari pemerintah pusat; (7) Ketiadaan alat ukur keberhasilan program, program bersifat partial tidak berkelanjutan dan tidak memiliki target kuantitatif yang disepakati bersama; (8) Kurangnya kemitraan dengan swasta/industri dan LSM; (9) Ketidakseimbangan perbandingan antara biaya pengembangan dan harga produk alternatif dengan beras, (Ariani dan Ashari, 2003; Martianto, 2005, Krisnamurthi, 2003).

Kebijakan Diversifikasi konsumsi pangan ke depan yang pertama dan pokok adalah adanya kesepakatan bersama untuk membuat blue print, yang membahas seluruh aspek yang terkait dengan pengembangan diversifikasi konsumsi pangan. Dalam blue print tersebut harus memuat rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang termasuk strategi, program, dana dan sumbernya, siapa mengerjakan apa dan lain-lain untuk mencapai diversifikasi konsumsi pangan secara total. Kemudian dari kerangka tersebut dijabarkan dan diimplementasikan secara bertahap, dan berkelanjutan. Ilustrasi pengembangan roadmap diversifikasi konsumsi pangan yang dikembangkan oleh Hariyadi dkk. (2004) seperti berikut : (1) Diversifikasi konsumsi pangan pokok, protein hewani, protein nabati, vitamin, mineral dan serat menuju pangan yang beranekaragam dengan tujuan akhir pola konsumsi beranekaragam, berkelanjutan, merata, sesuai dengan karakteristik daerah; (2) Dari dominasi beras sebagai pangan pokok menuju diversifikasi konsumsi pangan pokok dan tujuan akhir adalah beranekaragam pangan pokok, berkelanjutan, merata, sesuai dengan karakteristik daerah.

Dalam PP nomor 68 pasal 9 (BBKP, 2003) secara eksplisit dikemukakan dalam ayat 1 yaitu Penganekaragaman pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Pada ayat 2 yaitu Penganekaragaman pangan dilakukan dengan meningkatkan keanekaragaman pangan, mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip seimbang. Pada ayat 3 yaitu Penganekaragaman konsumsi pangan ditetapkan oleh Menteri atau kepala Lembaga pemerintah Nondepartemen yang bertanggung jawab di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri dan perdagangan, koperasi, serta riset dan teknologi sesuai dengan tugas dan

kewenangannya masing-masing. Dengan demikian blue print yang dibuat juga harus mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan.

Penjabaran dari aspek diatas, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung tercapainya diversifikasi konsumsi pangan antara lain adalah (1) Peningkatan dan pencatatan produksi pangan pokok selain beras. Sudah saatnya dilakukan pencatatan secara statistik dan terus menerus untuk pangan lokal seperti tales, garut, dan sejenisnya sehingga keberadaan pangan ini akan termonitor dengan baik. Meningat setiap daerah mempunyai pangan lokal yang spesifik maka perlu dikembangkan cadangan pangan non beras; (2) Pengembangan diversifikasi produk olahan dengan melibatkan industri/swasta. Memperhatikan kasus pada mi dan beras, maka pengembangan produk olahan pangan lokal terutama untuk kelompok sasaran berpendapatan rendah, pemerintah harus memberi dukungan penuh kepada pihak industri/swasta baik dalam bentuk pendanaan maupun fasilitas lainnya. Karena pengembangan pangan lokal kadang-kadang tidak mampu berkompetisi dengan pangan yang sudah establis seperti beras; (3) Peningkatan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan yang bergizi, beranekaragam, berimbang melalui model Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia masih belum terdiversifikasi sempurna baik untuk konsumsi pangan secara keseluruhan maupun untuk pangan pokok. Konsumsi pangan masih bias pada kelompok padi-padian yang dalam hal ini berarti bias pada beras karena beras masih merupakan pangan pokok utama dan pertama.

Diversifikasi konsumsi pangan pada hakekatnya tidak hanya sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada beras tetapi juga sebagai upaya perbaikan gizi masyarakat untuk mendapatkan manusia yang berkualitas dan mampu berdaya saing dalam percaturan globalisasi dan juga meningkatkan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, program diversifikasi konsumsi pangan harus terus dilakukan dengan belajar dari pengalaman kegagalan selama ini. Membuat blue print atau roadmap adalah unsur pokok yang harus dilakukan, kemudian konsistensi dari masing-masing pihak (pemerintah pusat dan daerah, industri makanan, LSM, masyarakat) untuk dapat mengimplementasikan secara berkelanjutan dengan koordinasi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ariani, M dan Ashari. 2003. Arah, Kendala dan Pentingnya Diversifikasi Konsumsi Pangan di Indonesia. Forum Agro Ekonomi. Vol. 21, No. 2. Desember. Bogor.

- BBKP. 2003. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Departemen Pertanian. Jakarta.
- BPS. 1996. Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi 1996. Buku 2. Jakarta
- BPS. 1999. Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi 1999. Buku 2. Jakarta
- BPS. 1999. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 1999. . Buku I. Jakarta.
- BPS. 2002. Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi 2002 Buku 2. Jakarta
- BPS. 2002. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 2002. . Buku I. Jakarta.
- BPS. 2003. Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi 2003. Buku 2. Jakarta
- BPS. 2003. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 2003 . Buku I. Jakarta.
- BPS. 2004. Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi 2004. Buku 2. Jakarta
- BPS. 2004. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 2004 . Buku I. Jakarta.
- Hariyadi,P; B. Krisnamurthi, D. Syah dan F.G. Winarno. 2004. Roadmap Penganekaragaman Pangan. Prosiding Penganekaragaman Pangan. konsep, realitas dan aplikasi. PT. Indofood Sukses Makmur tbk. Bogasari Flour Mills dan Forum Kerja Penganekaragaman Pangan.
- Jaringan Informasi pangan dan Gizi. 2002. Lembar Berita. Vol. X, No. 1. Forum Koordinasi Jaringan Informasi Pangan dan Gizi. Departemen Kesehatan, Jakarta.
- Khumaidi. 1997. Beras sebagai Pangan Pokok Utama Bangsa Indonesia, Keunikan dan Tantangannya. Orasi Guru Besar Ilmu Gizi. Fakultas Pertanian. IPB. Bogor.
- Krisnamurthi,B. 2003. Penganekaragaman Pangan : Pengalaman 40 tahun dan Tantangan ke Depan. Jurnal Ekonomi Rakyat. Th. II, No. 7. Oktober.
- Martianto, D. 2005. Pengembangan Diversifikasi Konsumsi Pangan. Seminar Pengembangan Diversifikasi Pangan. 21 Oktober. Bappenas. Jakarta.
- Martianto, D. dan M. Ariani. 2004. Analisis Konsumsi Pangan Rumah Tangga. Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII. 17-19 Mei. LIPI, Jakarta.
- Suyono. 2002. Peta Pangan dan program Penganekaragaman Pangan 1939-2002 (63 Tahun). Dalam Penganekaragaman Pangan. Prakarsa Swasta dan Pemerintah Daerah. Forum Kerja Penganekaragaman Pangan. 2003. Jakarta.